

Warta

PERTANIAN

VOLUME XIII/EDISI JANUARI 2020

Menuju Kedaulatan Pangan

SONO

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KIAN MEMPRIHATINKAN

AYO

**PERANGI
BERSAMA**



PENGARAH:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

PELAKSANA:

Abiyadun, SE, MM

ANGGOTA:

Dra. Ria Satiti
Imam Santoso, SE
Alice Raga Dewi, S.Sos
Hendrayani Yacub, S.Sos
Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin

Majalah Warta Pertanian

SALAM REDAKSI

**CEGAH PENGALIHFUNGSIAN
LAHAN
PERTANIAN**



PRAKTEK praktek alih fungsi lahan pertanian ke area non-pertanian sungguh memprihatinkan. Rata-rata luasan lahan baku sawah berkurang sebesar 650 ribu hektare (ha) per tahun atau ekuivalen dengan 6,5 juta ton beras (BPS), dengan asumsi produksi beras sebesar 10 ton per tahun.

Biasanya, alih fungsi pertanian ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik, dan jalan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Pada hal secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam Undang Undang No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tidak main-main, aturan ini mengancam siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan pertanian. Ancaman pidananya kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

Praktek pengalihfungsian lahan pertanian itu sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

Sebenarnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Langkah dilakukan untuk bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tak hanya Kementan, semua elemen lembaga pun diturunkan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan kajian dan monitoring untuk dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga bersatu dan kompak melawan praktek alih fungsi lahan pertanian yang sangat meresahkan beberapa tahun belakangan ini. Beberapa daerah itu antara lain Kota Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) yang memiliki sekitar 45 hektare (ha) lahan sawah tetap berproduksi meskipun berada di tengah kota. Bukan semata mempertahankan menjadi lahan pangan berkelanjutan, tapi bagaimana menjaga dan menambah nilainya.

Kemudian, Kabupaten Bekasi, Jabar yang juga berkomitmen menjaga wilayahnya agar tidak terjadi disfungsi lahan pertanian. Dukungan lain datang pula dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim). Situbondo memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2017 yang telah menetapkan lahan seluas 30 ribu ha untuk dilindungi secara berkelanjutan.

Kemudian Kalimantan Barat (Kalbar). Melalui Gubernurnya, Sutarmidji menyatakan, ikut menjaga keberlanjutan lahan pertanian, bahkan jika mampu menambah areal lagi, merupakan program penting. (*)



4



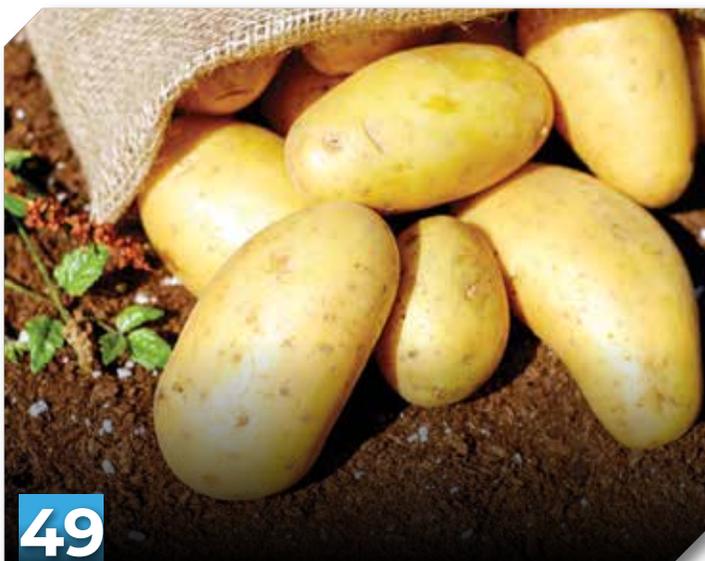
14



34



43



49

5

SETIAP tahun sekitar 60.000 hektare (ha) lahan pertanian mengalami penyusutan. Ini disebabkan terjadi praktek alih fungsi lahan pertanian ke area non-pertanian.

8

PEMERINTAH serius dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Semua elemen lembaga pun diturunkan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan kajian dan monitoring untuk dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)

22

Pemasaran beras berorientasi ekspor menjadi prioritas program Kementerian Pertanian (Kementan). Pada 2020,

32

Fokus kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) pada awal 2020 diarahkan terhadap peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian untuk kesejahteraan petani. "Untuk Pertanian Maju, Mandiri,

36

Musim hujan yang datang pada akhir 2019 sampai puncaknya pada Februari 2020 merupakan ancaman terhadap lahan pertanian Indonesia.

45

Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung, khususnya untuk industri pakan dan peternak.

48

Memasuki 2020 curah hujan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas ada tinggi dan ada juga yang sedang.



Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. Saya juga minta kepada penegak hukum (kepolisian, red) untuk menangkap mereka yang membuat lahan pertanian menjadi non-pertanian,”

Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian RI

Alih Fungsi Lahan Pertanian Kian Memprihatinkan

AYO

PERANGI BERSAMA



Alih fungsi lahan masih menjadi momok yang menakutkan bagi dunia pertanian Indonesia. Meski sudah lama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Toh sampai sekarang praktek alih fungsi lahan pertanian masih terjadi. Bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan. Inilah yang menjadi perhatian serius Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama jajarannya.

SETIAP tahun sekitar 60.000 hektare (ha) lahan pertanian mengalami penyusutan. Ini disebabkan terjadi praktek alih fungsi lahan pertanian ke area non-pertanian. Biasanya, alih fungsi pertanian ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik, dan jalan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai perangkat kerjanya terus melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian yang kian memprihatinkan. Pencegahan dilakukan terutama untuk mengurangi beban dan masalah baru bagi sektor pertanian ke depan.

“Saya katakan bahwa lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional,” tegas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Secara filosofis, lanjut dia, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi sentral bagi kehidupan masyarakat

Indonesia yang bercorak agraris. Lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial dan religius.

“Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. Saya juga minta kepada penegak hukum (kepolisian, red) untuk menangkap mereka yang membuat lahan pertanian menjadi non-pertanian,” tegasnya di Pangalengan, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2020).

Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam kitab UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tidak main-main, aturan ini mengancam siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan.

Asal tahu saja, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

Syahrul mengatakan, praktek pengalihfungsian lahan sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini

tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

"Jika ada lahan pertanian yang rusak akibat banjir atau bencana alam lainnya, pemerintah akan memberikan bibit-bibit pertanian untuk dilakukan penanaman kembali. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan sektor pertanian itu di dalamnya juga ada masyarakat dan pengusaha. Mereka harus saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia," pungkasnya.

Saat di Banjarnegara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum lama ini, Mentan SYL juga meminta kepolisian agar menindak pelaku alih fungsi lahan pertanian di daerah itu. Syahrul menyebutkan, akibat ulah alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan sebanyak 10 ribu ha sawah terendam banjir serta gagal panen.

Pemerintah juga menaruh perhatian penting menjaga terjadinya alih fungsi lahan melalui regulasi Peraturan Presiden Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Tahun 2020 di Depok, Senin (13/1/2020), Mentan SYL sempat menegaskan bahwa pihaknya akan melawan usaha mengalihfungsikan lahan pertanian. Ia minta agar perlawanan pada alih fungsi lahan dilakukan secara sinergi dengan pro-aktifnya peranan pemerintah daerah melakukan pencegahan optimal.

Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini mengancam siapa saja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan. Pelanggar dalam aturan tersebut akan masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

"Ada sebanyak 267 juta penduduk Indonesia ada di tangan kita, yang harus dipenuhi pangannya. Apa yang mereka makan tergantung kerja keras dan yang kita hasilkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh main-main karena ini menyangkut harga diri bangsa kita. Persoalan alih fungsi lahan harus kita lawan secara bersama-sama!" tegasnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, penyusutan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun sekitar 60 ribu ha nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300 ribu ton setiap tahun.

Sebenarnya, kata Kuntoro, pemerintah melalui Kementan sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Langkah dilakukan untuk bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

"Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumberdaya melainkan bencana. Karena itu, perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang, termasuk perlindungan lahan pertanian dalam penataan ruang," katanya di Jakarta, Senin, (13/1/2020).





Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel turut bersuara tentang laju konversi lahan pertanian yang terus meningkat. Dia meminta daerah terlibat dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.

“Kita akan mendorong daerah untuk memiliki pemikiran yang sama. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian, bukan hanya tugas Kementan atau pemerintah pusat saja. Pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi harus ikut terlibat. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang sama dalam mewujudkannya,” ungkapnya se usai bertemu Mentan SYL di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1/2020) siang.

Menurut Rahmat, meningkatnya laju konversi lahan karena masyarakat belum melihat bertani sebagai usaha yang menguntungkan. Padahal bila dikelola secara profesional, pertanian bisa menghasilkan keuntungan yang besar. “Banyak yang menjual lahan pertaniannya karena menganggap pertanian itu keuntungannya kecil. Sebetulnya keuntungan dari usaha pertanian tidak kalah dengan industri jika dikelola dengan benar,” jelasnya.

Rahmat menyebutkan, laju konversi lahan pertanian perlu untuk dikendalikan lantaran lahan merupakan faktor esensial dalam kemajuan pertanian Indonesia. Pertanian merupakan ujung tombak dan fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Negara kita adalah negara besar. Untuk bisa mewujudkan NKRI yang kuat, maka pertanian kita harus menjadi fondasi yang kuat. Bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan tentunya dimulai dengan ketahanan pangan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Radian, pengamat pertanian dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat memuji sikap tegas Mentan Syahrul yang bakal memperkerakan hukum pelaku alih fungsi lahan tani.

“Ketegasan Mentan Syahrul Yasin Limpo menolak alih fungsi lahan pertanian itu sama artinya menyelamatkan masa depan pertanian. Masa depan ketahanan pangan Indonesia dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya, Senin (13/1/2020).

Menurut Radian, membiarkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian bakal menciptakan kemiskinan baru sebab lapangan kerja dan pasokan serta ketersediaan pangan akan berkurang.

“Harga berpotensi melonjak, masyarakat kesulitan membeli bahan pokok dan muncul pengangguran baru karena petani tidak punya lagi lahan (bertani, red) untuk dikelola,” ucapnya.

Selanjutnya, ungkap Radian, alih fungsi lahan pertanian berisiko menimbulkan areal tanah tidak produktif yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan hidup.

Pakar Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB) Lala M. Kolopaking mengatakan, salah satu tantangan menjaga lahan pangan berkelanjutan adalah fakta bahwa ada nilai pada tiap sebidang tanah.

“Katakanlah kalau tanah itu berada di kota, kemudian produksi pertaniannya tidak memiliki nilai bisnis, untuk membayar pajak lahan saja tidak cukup. Sementara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setiap tahun naik, maka meskipun ada peraturan larangan mengalihfungsikan, petani terpaksa menjual karena mereka tidak mampu hidup dari situ,” kata mantan Kepala Program Studi Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB, Jumat (17/1/2020) di Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementan.

Oleh karenanya, ketegasan pemda, lanjut Lala, sangat dinantikan sebagai bentuk keberpihakan dan dukungan terhadap konservasi lahan dengan cara melibatkan petani dengan bisnisnya agar menjaga nilai ekonomi lahannya cukup.

Akademisi yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi Sosial Budaya ini menuturkan bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukannya di Kota Sukabumi, Jabar, ada sekitar 45 ha lahan sawah tetap berproduksi meskipun berada di tengah-tengah kota.

“Pemkot Sukabumi memiliki *passion*, mereka tahu, lahan sawah itu adalah sesuatu hal penting. Bukan semata mempertahankannya menjadi lahan pangan berkelanjutan, tapi bagaimana menjaga dan menambah nilainya. Sawah itu tetap berproduksi, dipetakan pemiliknya, tetapi diberi nilai ekonomi lebih, seperti dengan menjadikan wisata sawah di tengah kota. Jadi ada nilai tambah dengan tetap melibatkan petani tentunya,” ujar Lala.

Dia menambahkan, alih fungsi lahan bukan hanya persoalan tata ruang, tapi juga harus memberikan peluang bagi petani untuk mencukupi ekonominya. “Pemda membuat regulasi itu sudah kewajiban, sehingga potensi surplus dan kekurangan bisa dipetakan. Seandainya kurang, tinggal memformulasikan bagaimana kerja sama antar wilayah. Jika itu dilakukan, ada nilai bisnis yg boleh dilakukan. Konteks ini tidak semata membicarakan produksi, membahas bagaimana agribisnis dalam arti entity yg dimiliki warga setempat, tapi juga pertumbuhan *local economic*, itu yang kita dorong,” pungkas Lala. **(tim humas)**

LEMBAGA ANTIRASUAH TURUN TANGAN

PEMERINTAH serius dalam melakukan pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Semua elemen lembaga pun diturunkan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan kajian dan monitoring untuk dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan monitoring yang dilakukan lembaga antirasuah terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), terdapat sejumlah permasalahan kunci dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

“Pertama, luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi teknis maupun non-irigasi, menunjukkan laju penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata luasan lahan baku sawah berkurang sebesar 650 ribu hektare per tahun atau ekuivalen dengan 6,5 juta ton beras (BPS), dengan asumsi produksi beras sebesar 10 ton per tahun,” ungkapnya Jumat (17/1/2020).

Untuk mencapai swasembada beras, lanjut Sarwo Edhy, Kementan melakukan berbagai program untuk memperluas lahan baku sawah. Sementara itu, dibutuhkan sedikitnya lima tahun bagi lahan sawah baru untuk mencari tingkat produktivitas padi seperti lahan sawah beririgasi teknis.

“Jadi dipastikan terjadi pengurangan luasan lahan sawah setiap tahun yang otomatis diikuti dengan turunnya produksi beras,” tuturnya.

Masih berdasarkan kajian KPK, pemerintah belum memberikan insentif dan pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah (pemda) dan pemilik lahan sebagaimana diatur pada pasal 38 sampai dengan Pasal 43 UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Akibatnya, pemilik lahan dan pemda enggan mempertahankan lahan pertaniannya dan beralih ke fungsi lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi bagi mereka,” ungkapnya.

Dalam kunjungan lapangan KPK ke Bekasi dan Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu, menunjukkan pemda tetap melakukan alih fungsi lahan baku sawah beririgasi teknis menjadi perumahan dan kawasan industri. Motifnya memperbesar pendapatan pajak dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“KPK juga menemukan koordinasi antara lembaga, baik di tingkat pusat maupun antara lembaga pusat dengan lembaga daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan tidak berjalan. Ini termasuk pengawasan dan pemantauan, tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk masalah alih fungsi lahan sawah ini,” tuturnya.

Dalam kajian tersebut juga terungkap KPK telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian/lembaga (K/L) yang terkait sejak 2017. Namun, sudah dua tahun tidak ada tindak lanjut. Untuk menjamin terlaksananya swasembada beras, maka laju penurunan lahan baku sawah perlu dikendalikan. KPK pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Pertama, pemerintah menunjuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan UU Nomor 41/2009.

Kedua, dalam pelaksanaannya, sedikitnya beberapa kementerian dapat diberikan tugas dan target yang spesifik. Yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mewajibkan setiap pemda untuk segera menetapkan regulasi untuk melarang pengalihan lahan sawah baku melalui penetapan area LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketiga, Kementan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan LP2B.

Dan keempat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan mekanisme keuangan untuk pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bagi daerah yang telah/belum melaksanakan LP2B.

Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga terus mengecam dan mengancam bagi siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan



pertanian. Ancaman tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Arah pengaturan dari UU ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi. Adapun Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan

agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan,” ujar Mentan di berbagai kesempatan.

Menurut Mentan, UU tersebut juga menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

“Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar,” ujar SYL.

Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo juga tegas meminta penegak hukum agar menangkap pengalihfungsi lahan pertanian. **(tim humas)**

MENTAN DAPAT DUKUNGAN DARI DAERAH



PEMERINTAH daerah (pemda) bersatu dan kompak melawan praktek alih fungsi lahan pertanian yang sangat meresahkan beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) yang berkomitmen menjaga wilayahnya agar tidak terjadi disfungsi lahan pertanian.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mendukung sikap Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang meminta agar pelaku alih fungsi lahan pertanian dipidanakan. Bahkan sikap tegas Syahrul ini bakal juga diterapkan di wilayahnya dengan regulasi yang ada terkait pertanian.

“Bekasi sendiri ingin mempertahankan lahan pertanian yang potensial. Apalagi di Bekasi menjadi wilayah perumahan dan industri strategis, jangan sampai mengganggu persawahan,” ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Eka menuturkan, tanah pertanian yang subur serta mendukung komoditas produksi di Bekasi tetap harus terus ada berkelanjutan.

“Tidak boleh ada nantinya lahan pertanian yang subur berubah fungsi menjadi ke peruntukan lainnya. Akhirnya merugikan tingkat produksi dan kesejahteraan petani Bekasi,” ucapnya.

Eka menyebutkan, pada 2019 panen raya di Bekasi mencapai produksi membanggakan. Dia tidak ingin akibat disfungsi lahan pertanian membuat produksi serta panen Bekasi terseok.



Dukungan lain juga datang dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim). Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menegaskan, wilayahnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2017 telah menetapkan lahan seluas 30 ribu hektare (ha) untuk dilindungi secara berkelanjutan. Ini sebagai komitmen mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Situbondo termasuk di antara 14 kabupaten/kota di Jatim yang telah memiliki Perda LP2B. Saat ini lahan 30 ribu ha tersebut akan menjadi target program penyuburan lahan melalui program unggulan kabupaten, yaitu Program Ekonomi Kebersamaan Kobessa. Program ini mensinergikan dan mengintegrasikan antara pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan.

“Melimpahnya limbah di tiga sektor tersebut akan diolah menggunakan teknologi secara tepat, sehingga limbah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui dukungan smart farming,” kata Dadang.

Program Kobessa sudah berjalan tiga tahun. Hamparan luas lahan pertanian sudah mengikuti SOP penyuburan lahan, dan akan terus bertambah, sebagaimana yang sudah ditargetkan masing-masing desa.

“Alhamdulillah manfaat program ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang pertama petani mendapatkan bantuan operasional organik yang terstandar dari pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, *cost* produksi petani dapat ditekan rendah karena terjadi subsidi silang pemanfaatan limbah tiga sektor dan efisiensi biaya karena dikerjakan bersama.

Bahkan muncul industrialisasi baru sarana produksi pertanian, melalui modal investasi lokal, antara lain penangkaran benih padi, pestisida hayati, pupuk organik, pakan ternak, dan sebagainya.

“Wilayah kami bisa mengendalikan harga komoditas pertanian, peternakan dan budidaya ikan menjadi satu harga kabupaten,” untkapnya bangga.

Dalam rangka mendukung program tahun kunjungan wisata Situbondo, pasca panen produk pertanian sebagian diolah, sehingga punya nilai tambah guna menunjang bertambahnya ragam jajanan dan oleh-oleh.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menyebutkan, Program Kobessa merupakan salah satu *leasson learned* solusi cerdas untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekaligus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para peternak dan petani.

“Dengan program ini dapat mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta menekan inflasi, karena biaya produksi bisa ditekan dan produktivitas tinggi,” jelasnya.

Dukungan berikutnya dari Kalimantan Barat (Kalbar). Peningkatan produksi komoditas dan bertambahnya luas tambah tanam (LTT) merupakan misi pertanian

yang disasar Kalbar.

Oleh sebab itu, Gubernur Kalibar Sutarmidji menyatakan, ikut menjaga keberlanjutan lahan pertanian, bahkan jika mampu menambah areal lagi, merupakan program penting.

“Kalbar saat ini ingin memamerkan kekayaan produksi komoditas pertaniannya yang bisa memasok kebutuhan nasional. Kalau lahannya dialih fungsikan, cita-cita itu sulit dicapai,” ujarnya di Pontianak, Selasa (14/1/2020).

Sutarmidji selalu mengingatkan jajarannya agar tak ‘bermain-main’ dengan kepentingan pelaku alih fungsi lahan pertanian.

“Saya terapkan sanksi tegas kepada yang tidak mematuhi ketentuan alih fungsi lahan. Kebutuhan pangan adalah utama, jangan sampai digerus akibat alih fungsi lahan pertanian,” ucapnya.

Lainnya, Sutarmidji mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang juga tegas menjaga tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian melalui regulasi telah ada.

Di lain pihak, Gloria Merry Karolina Ginting, kasubdit Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen PSP Kementan memberi contoh, di tengah derasnya ancaman alih fungsi lahan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng) merupakan salah satu wilayah yang berhasil menerapkan perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di sana, ada sekitar 25 ribu ha yang sampai saat ini masih dipertahankan.

“Kami sangat mendukung penerapan LP2B di Kabupaten Temanggung karena secara regulasi, UU ini sudah ditindaklanjuti dengan PP yang mengacu pada lembaga BKPTRD (Badan Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Daerah),” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Masrik Amin Zuhdi.

Dia mengatakan, pihaknya juga menguatkan peraturan dengan menyusun perda yang berlangsung pada 2012. Dalam perda ini, lahan pertanian di Temanggung terbebas dari alih fungsi lahan.

“Temanggung sudah menyiapkan susunan ini sejak 2012 agar lahan pertanian di Temanggung terbebas dari alih fungsi lahan,” katanya.

Ketua Kelompok Tani Sumberhasil Temanggung Asrofi mengaku senang karena seluruh anggota menyatakan sepakat dalam penerapan LP2B ini. Kesepakatan ini menjadi kado istimewa bagi petani setempat karena Temanggung adalah wilayah hijau pertanian.

“Ini terutama untuk lokasi paling subur karena yang paling diuntungkan di kelompok kami adalah sumber hasil. Pada akhirnya kami menerima kado karena seluruh anggota Poktan berkomitmen mempertahankan lahan yang sebesar 25 ha ini. Apapun yang terjadi lahan di Temanggung tetap tidak bisa beralih fungsi,” tukasnya. **(tim humas)**



TIGA MISI RI UNTUK PANGAN DUNIA

Lawatan Internasional Mentan SYL

GLOBAL Forum Food and Agriculture (GFFA). Forum ini adalah konferensi internasional yang fokus terhadap masa depan industri pertanian dan pangan global, serta isu kebijakan pertanian pangan.

GFFA memberikan kesempatan bagi perwakilan dari dunia politik, bisnis, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sipil untuk berbagi ide. Selain itu juga meningkatkan pemahaman tentang topik pilihan kebijakan pertanian saat ini dalam konteks ketahanan pangan.

Dikutip dari laman GFFA, forum ini bertujuan untuk memberikan dorongan segar untuk debat dan melihat perdagangan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan global dari semua sudut.

GFFA digelar dua tahun sekali dan dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) sedunia. GFFA 2020 merupakan forum global ke-11 yang berlangsung antara 16-18 Januari 2020 di Berlin, Jerman dengan topik 'Pertanian Menjadi Digital; Solusi Cerdas untuk Pertanian Masa Depan'.

GFFA diselenggarakan Kementerian Federal Pangan dan Pertanian (BMEL) Jerman, bekerja sama dengan Senat Berlin, Messe Berlin GmbH, dan GFFA Berlin eV. GFFA ini diadakan bersamaan dengan International Green Week.

Lebih dari tiga hari, diperkirakan 2.000 pengunjung internasional dari bidang politik, industri, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sipil mendiskusikan topik utama dalam perhelatan GFFA 2020. Puncak forum ini adalah Konferensi Menteri Pertanian informal terbesar di dunia.

Sekitar 70 Mentan dari berbagai negara dan perwakilan tingkat tinggi dari organisasi internasional mengadopsi komunikasi politik bersama tentang topik utama masing-masing.

Dari Indonesia, dihadiri langsung Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam forum tersebut, SYL dan delegasi Pemerintah Republik Indonesia (RI) membawa tiga misi penting.

“Pemerintah Indonesia setidaknya membawa tiga misi tentang pangan untuk kemanusiaan. Selain itu, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju,” jelas Mentan di Berlin (18/1/2020).

Pertama, menghilangkan batasan yang menghambat intervensi bantuan pangan bagi kemanusiaan.

Kedua, negara-negara maju harus memiliki komitmen yang kuat untuk membantu negara-negara berkembang dan terbelakang untuk dapat maju bersama melalui transfer ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, keahlian,

dan pengalaman.

Ketiga, menjadikan pangan sebagai instrumen penting dan strategis sebagai bahasa perdamaian dunia. “Misi tersebut kita diusulkan untuk dideklarasikan dalam forum sebagai bagian dari kesepahaman bersama antara Menteri Pertanian sedunia,” ujar Syahrul.

“Itu misi yang diperjuangkan delegasi Indonesia dalam forum global tersebut,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dua periode itu.

Setelah dari Berlin, Mentan selanjutnya lawatan ke Italia. Kunjungannya ini untuk memperluas akses produk pertanian Tanah Air. Di Roma, SYL melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Pangan, dan Kehutanan Italia Teresa Bellanova, Senin, (20/1/2020).

Dalam pertemuan itu disepakati penguatan kerja sama dan promosi pertanian. Ini menjadi bagian MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Pertanian (Kementan) RI dengan Kementerian Pertanian, Pangan, dan Kehutanan Republik Italia.

“Kerja sama ini dalam budidaya, mekanisasi pertanian, pengelolaan sumberdaya air, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan kapasitas SDM (sumberdaya manusia),” ujar SYL.

Mentan RI dan Menteri Teresa Bellanova juga membahas sejumlah isu bilateral, terutama terkait peningkatan nilai perdagangan dan investasi di bidang pertanian antara kedua negara.



SYL menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan komoditas pertanian seperti sawit, karet, buah tropis, the, dan rempah-rempah. Dia juga mengundang investasi Italia di sektor pertanian dan peternakan di Indonesia.

"Saya sampaikan kepada Menteri Bellanova, produk Indonesia telah memenuhi standar Uni Eropa di bidang kesehatan, dan fitosanitari SPS, sehingga bisa di ekspor ke pasar Eropa, termasuk Italia," jelasnya.

Mentan RI juga menekankan bahwa sektor pertanian Indonesia telah menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan dikelola secara sustainable.

Secara khusus, kedua menteri membahas ekspor sawit Indonesia. Produk sawit diketahui digunakan dalam industri makanan dan sebagai bahan biodiesel di Italia. Berdasarkan data ekspor sawit Indonesia ke Italia adalah sebesar USD 570,2 juta atau 29,7 persen dari total ekspor Indonesia ke Italia (sebesar USD 1,92 miliar) dan sekitar 79,7 persen dari total ekspor pertanian Indonesia ke Italia atau sebesar USD 715,6 juta.

Menteri Bellanova mengaku dapat menerima penjelasan bahwa perkebunan sawit berperan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) RI untuk Italia Esti Andayani menilai penandatanganan MoU tersebut akan semakin memperkuat hubungan kedua negara dan dapat mendorong pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama itu akan mempermudah pelaksanaan pertukaran informasi pertanian, pelatihan untuk peningkatan kapasitas serta penyelenggaraan joint research oleh lembaga penelitian pertanian di kedua negara.

Indonesia dan Italia memiliki hubungan yang telah terjalin sejak 1959, dan baru saja merayakan 70 tahun hubungan diplomatik pada 2019. Italia adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia di antara negara-negara Uni Eropa. Dalam periode Januari-November 2019, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 3,17 miliar.

Keesokan harinya atau Selasa (21/1/2020), Mentan SYL bertemu dengan Deputy Director General Food Agriculture Organization (FAO) Laurent Thomas di Kantor Pusat FAO, Roma.

Mentan RI mendorong organisasi di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang menangani Pangan dan Pertanian Dunia untuk aktif membantu



negara mitra di Afrika dan Pasifik yang masih terbelakang dalam ketahanan pangan. "Indonesia selama ini telah banyak membantu negara-negara mitra di Afrika," tandas SYL.

Misalnya, lanjut dia, membangun *training center* di Gambia dan Tanzania, lalu membuat proyek percontohan pengembangan kacang kedelai di Madagaskar dan padi di Sudan. Indonesia juga mengirim bantuan traktor tangan untuk beberapa negara pasifik seperti Fiji dan Vanuatu. "Indonesia memiliki banyak tenaga ahli dalam berbagai bidang yang siap untuk bekerja sama dengan FAO dalam membantu negara-negara mitra di Afrika dan Pasifik," kata Syahrul.

Dalam pertemuan itu, Mentan RI bicara delapan poin penting sebagai posisi pertanian Indonesia. Pertama, Indonesia mendorong kerja sama lebih erat dengan FAO sebagai salah satu produsen sumber pangan terbesar di dunia, untuk memenuhi pangan nasional dan dunia.

Mentan juga mengajak FAO dalam mengembangkan Agriculture War Room (AWR) di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat kontrol monitoring dan evaluasi mobilisasi sumberdaya pertanian. Mentan mengundang seluruh technical team FAO untuk membantu Indonesia.

Dirinya ingin memastikan validitas data yang lebih kuat dan pencapaian produksi yang lebih efektif, efisien, dan berstandar Internasional, yang pada implementasinya dikawal secara intensif melalui Kostratani yang baru saja dibentuk.

FAO diharapkan dapat berperan dalam menyeimbangkan situasi pasar produk pertanian yang cenderung diskriminatif, dan merugikan negara berkembang selaku produsen. Negara-negara importir yang pada umumnya negara maju, menerapkan standar-standar yang seringkali menyulitkan dan menekan daya tawar negara eksportir, dalam hal ini khususnya kelapa sawit bagi Indonesia.

Mentan mendukung *hand-in-hand initiative* yang menjadi Program DG FAO yang baru, yang fokus pada program





kemitraan antara negara maju dan berkembang untuk dapat maju bersama dalam berbagai aspek rantai nilai usaha pertanian.

Indonesia turut mengajak FAO untuk bersama-sama membantu negara-negara ketiga yang membutuhkan bantuan teknis, khususnya penguatan kapasitas melalui pusat-pusat pelatihan yang telah dibangun Indonesia di beberapa negara Afrika, seperti Tanzania dan Gambia.

Deputy Director General FAO Laurent Thomas mengatakan, FAO sangat terkesan dengan inisiatif Mentan SYL dalam pengembangan AWR. Inisiatif tersebut

dinilai sejalan dengan program FAO.

Tim FAO menyampaikan secara singkat data *management system* yang ada di FAO seperti AMIS, pemanfaatan GIS, Early Warning System, dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligent lainnya. FAO berkomitmen penuh untuk mendukung Indonesia dalam pengembangan AWR dan program digitalisasi pertanian modern di Tanah Air.

Dalam pertemuan itu, Mentan RI juga mendapatkan kesempatan untuk meninjau berbagai fasilitas data *management system* yang dimiliki FAO.

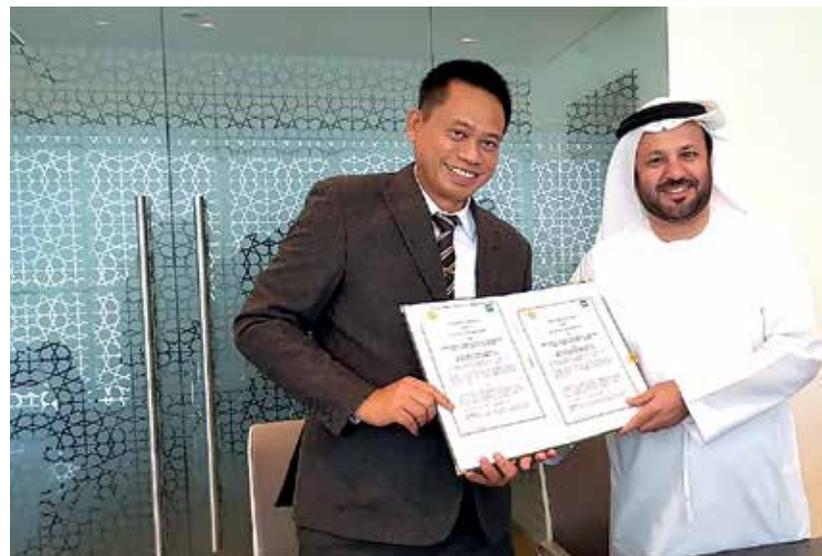
Gandeng Emirat Arab

Sementara di Abu Dhabi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Crown Prince Muhammed Bin Zayed Al Nahyan melakukan pertukaran dokumen kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi, sedangkan dari PEA, yakni Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Pertukaran dokumen kerja sama ini salah satunya di bidang pertanian.

Ke depan akan dibangun kerja sama kedua negara yang mencakup 14 area kerja sama di bidang pertanian dan diversifikasi pangan. Ini di antaranya proses dan produksi tanaman, peternakan dan pertanian, sanitasi dan phytosanitary, teknologi dan infrastruktur pertanian.

Selain itu, juga kerja sama di bidang *science* dan teknis, keamanan makanan, teknis dan teknologi industri pertanian modern, asuransi pertanian, skema keuangan agrikultur, sistem informasi dan komunikasi pertanian. Peningkatan kemampuan SDM melalui *capacity building*, fasilitas dagang dan pertanian, dan area terkait lainnya.

Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai kerja sama antar kedua negara ini



mempunyai nilai strategis. Secara khusus, dia meminta semua pihak di Kementan optimalkan kerja sama tersebut.

Menurut SYL, PEA punya keterbatasan dalam memproduksi pangan, namun teknologi yang dimiliki dapat diadopsi. Teknologi modern pertanian di lahan gurun dengan kering salah satunya.

"Banyak hal yang dapat diperoleh dari kerja sama ini. Dan negara kita pun sangat besar dan punya potensi sumberdaya pertanian. Kita tangkap peluang ini untuk meningkatkan ekspor dan transfer teknologi," katanya.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi di PEA ini, turut dilakukan pertukaran dokumen MoU antara Elite Agro LLC, PEA dan Badan Litbang Pertanian Indonesia. Kerja sama bertema 'Research and Development Collaboration for Agricultural Crops Commercialization' ini akan dilakukan di Lembang, Jawa Barat. Kepala Badan Litbang Pertanian Kementan Fadry Djufry menerima dokumen secara resmi dari CEO Elite Agro Group Abdulmonem Al Marzooqi.

Menurut Fadry, kerja sama ini untuk memperluas hubungan antar kedua belah pihak, dalam upaya komersialisasi dan transfer pengetahuan serta teknologi di bidang pertanian, khususnya hortikultura.

Di tempat terpisah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Perwakilan RI di luar negeri di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Jakarta, Jumat (10/1/2020), Mentan SYL secara khusus meminta

komitmen para Kepala Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan ekspor pertanian.

"Kementan punya Program Gratiexs, yakni Gerakan Tiga Kali Ekspor. Kita mau ekspor kita meningkat tiga kali lipat. Dan ini butuh akses pasar. Saya minta dukungan kalian untuk membuka akses pasarnya," kata Mentan saat menjadi pembicara bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Syahrul mengungkapkan, kementeriaannya siap memfasilitasi kebutuhan bahan pangan maupun bahan baku industri pangan seluruh negara di dunia. Sebagai contoh, sektor perkebunan Indonesia berkontribusi hingga USD 14,61 miliar, dan perlu didorong sektor lainnya. Ini mengingat potensinya sangat baik. "Saya ingin ekspor kita bisa menembus Rp2.000 triliun. Dan itu bisa bila kita semua bersama dan bersinergi," tegasnya.

"Dalam pertemuan ini strategis karena kita punya sumberdaya yang besar, dan petani akan mendapat banyak nilai tambah dengan ekspor, dan tentu membantu devisa negara," ungkap SYL.

Kepala Perwakilan RI di Brunei Darussalam memberi tanggapan agar memaksimalkan pemanfaatan 'direct trade' via Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), selain melalui Singapura yang selama ini menjadi hub utama di ASEAN. Jalur ini dianggap efektif dapat memangkas waktu dan ongkos pengiriman barang. Di samping itu potensi ekspor produk peternakan sangat terbuka di Brunei. **(tim humas)**





AKHIR 2019, EKSPOR PERTANIAN PALING CEMERLANG



GEBRAKAN Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada awal kepemimpinannya di sector pertanian membuahkan hasil. Gerakan Ekspor Tiga Kali Lipat (Gratieks) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu singkat membuktikan kenaikan kontribusi pertanian terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Ini ditandai dengan dibubuhkannya catatan prestasi cemerlang di bidang ekspor pertanian pada akhir 2019 seperti buah-buahan tahunan,.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Desember 2019, ekspor Indonesia di sektor pertanian menyumbang angka cukup besar, yakni sekitar USD 370 juta

atau naik sebesar 24,35 persen. Komoditas ekspor pertanian tersebut antara lain buah-buahan tahunan, sarang burung, hasil kayu, biji kakao, tanaman obat aromatik, dan rempah-rempah. Ekspor minyak kelapa sawit pun tercatat mengalami kenaikan dan berkontribusi mendorong ekspor industri pengolahan.

“Dari semua sektor yang ada, sektor pertanian menyumbang USD 370 juta atau naik sebesar 24,35 persen selama Desember lalu (2019, Red),” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Kamis, (16/1/2020).

Menurut dia, kenaikan juga dialami sektor lain seperti migas, industri, dan sektor pertambangan. Secara keseluruhan, total nilai yang ada mencapai USD 14,47 miliar.

Mentan SYL menegaskan, cemerlangnya kinerja ekspor yang dirilis BPS membuktikan bahwa esensi peran negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat terwujud. Negara berhasil memfasilitasi ekspor komoditas lokal dan memproteksi terjadinya impor.

“Tugas negara adalah proteksi (perlindungan, red) untuk tujuan kepentingan rakyat. Tak mungkin mewujudkan ide kesejahteraan tanpa tindakan negara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Karena itu, SYL menekankan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi serta ekspor pertanian, salah satu kebijakan tegas yang dijalankan adalah melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian, sehingga tidak memberikan ruang sedikit pun adanya alih fungsi lahan. Bahkan, mungkin mempolisikan atau menyeret ke ranah hukum para pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah.

Sementara dalam pertemuan Akselerasi Gratieks Komoditas

Perkebunan di Auditorium Gedung D Kampus Kementan, Rabu (8/1/2020), Kementan bersama eksportir di sektor perkebunan bertekad meningkatkan produksi dan mendorong akselerasi Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

SYL mengatakan, dalam lima tahun ke depan pihaknya akan membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing produksi pertanian. "Izinkan saya ikut campur di bawah pak! Teknis dari yang ditanam karena kalau bapak tidak tanam *nggak* mungkin bisa ekspor," katanya kepada peserta pertemuan.

Menurut Syahrul, eksportir harus memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas suatu komoditas untuk mendorong ke tiga kali lipat ekspor. Dalam hal ini, pemerintah siap menjadi partner para eksportir dalam pendekatan-pendekatan di hulu untuk melakukan pengembangan produk-produk khusus komoditas pertanian kemudian bagaimana membudidayakannya atau menjaganya sampai dengan cara pengolahan.

"Perkebunan kita punya prospek yang luar biasa apalagi kita negara tropis yang memiliki komoditas spesifik. Kalau begitu, itu kita benahi dari katakanlah di penanamannya. Tentu saja tidak hanya dengan tangan pemerintah, tapi bersama," tegasnya.

Selain gerakan ekspor, lanjut Mentan, peranan eksportir harus bisa membuka lapangan pekerjaan secara luas. "Saya menitipkan pesan kepada eksportir agar kalian membuka lapangan pekerjaan secara luas. Kami butuh tangan eksportir agar rakyat kita banyak yang kerja. Caranya tingkatkan ekspor kalian menjadi tiga kali lipat," tandasnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, program peningkatan produksi dan ekspor yang dicanangkan Mentan Syahrul



mulai menunjukkan dampak positif. "Saat ini kami terus menggenjot lalu lintas ekspor melalui Program Gratieks sesuai arahan bapak Mentan," ujarnya.

Kuntoro mengatakan, kenaikan juga dipengaruhi oleh dibukanya akses pasar dan insentif berbagai program peningkatan. Semua upaya ini dilakukan agar pemangku kepentingan mampu bekerja secara baik. "Hasilnya banyak komoditas pertanian yang mengalami kenaikan di antaranya sarang burung walet, kopi, rumput laut, serta produk lain dari perkebunan," tukasnya.

Sejatinya Program Gratieks telah diinisiasi sejak 2015 di level Sulawesi Selatan (Sulsel). Kala itu Presiden Jokowi menyambut baik dan mengapresiasi gerakan ekspor ini. Sulsel berhasil melakukan ekspor ke-24 negara tujuan





dengan 27 komoditas berbeda dengan nilai Rp62 triliun saat itu.

Dampak ekonomi program ini pada 2018, terasa dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang mencapai 7,07 persen, dan berhasil menciptakan nilai tambah Rp462,34 triliun atas dasar harga berlaku. Sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp309,24 triliun.

Kuntoro menjelaskan, program yang kini diadopsi dalam level nasional oleh Kementan turut juga memberi dampak positif. Program peningkatan produksi dan ekspor yang dicanangkan Mentan ini mampu memacu tren positif ekspor pertanian pada Desember 2019.

Pengamat pertanian UGM Prof Agus Ali menuturkan, tekad Mentan Syahrul terkait ekspor pertanian harus disambut baik. "Dengan begitu perlu mekanisme sistem yang baik, sehingga dapat memacu ekspor perkebunan seperti diinginkan," ujarnya, Jumat (10/1/2020).

Agus menilai, sejauh ini Mentan cukup erat dan menjalin koordinasi yang bagus dengan eksportir maupun petani yang merupakan pelaku utama ekspor pertanian. "Itu bagian dari sistem yang baik. Koordinasi antara pelaku usaha dan petani dengan Kementan. Ditambah perlu kemudahan regulasi," ucapnya.

Pengamat pertanian Universitas Nasional I.G.S. Sukartono, Senin (20/1/2020) menambahkan, target tiga kali ekspor selama lima tahun ke depan yang dicanangkan Mentan Syahrul merupakan program realistis. "Amat mungkin dapat terwujud ya. Kita semua mengetahui bahwa potensi sumberdaya pertanian Indonesia begitu banyak yang bisa dikelola dengan baik untuk berkompetisi di pasar internasional," ujarnya.

Selanjutnya, Sukartono menjelaskan, arah tiga kali ekspor juga bakal memacu kapasitas produksi pertanian nasional meningkat, sehingga ikut mampu memenuhi stok pangan domestik.

Mencontoh Koperasi di Roma

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kunjungan kerjanya di Roma, Italia menyempatkan diri mengunjungi salah satu koperasi pertanian terbesar di Italia, Confagricoltura (20/1/2020). Secara khusus Mentan mengaku ingin adanya kerja sama koperasi pertanian kedua negara.

Kerja sama ini sebagai upaya mendorong ekspor komoditas pertanian. Fasilitasi akses pasar diharapkan memberi nilai lebih bagi ekspor sawit, kopi, dan produk rempah. SYL mendorong pertukaran informasi kebijakan pengembangan koperasi pertanian.

"Sistem manajemen koperasi pertanian Italia yang mengintegrasikan seluruh aspek yang mencakup teknologi, pemenuhan standar internasional, ekonomi, sosial, dan bisnis dapat menjadi acuan bagi pengembangan koperasi Indonesia," jelasnya.

Syahrul ingin sinergi koperasi dengan kegiatan ekspor juga diperkuat di masa mendatang. Pendampingan pada petani mulai dari budidaya hingga mampu menembus pasar ekspor seperti melalui pemanfaatan pendanaan, asuransi, dan negosiasi dengan komunitas pembeli di luar negeri. Saat ini pPemerintah Indonesia telah mempersiapkan kurang lebih Rp50 triliun KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi petani dengan bunga rendah. "Kostratani yang telah ada, nantinya harus



mendorong kegiatan pemasaran, pemenuhan standar, dan membangun jaringan internasional,” tegas Mentan.

Kopi Tersohor di Jerman

Mentan SYL tampak sumringah ketika melakukan kunjungan kerja ke Berlin, Jerman. Dia menemukan Kopi Blawan yang berasal dari dataran tinggi Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang harganya mahal. Untuk setiap kilogram Kopi Blawan, pembeli harus merogoh kocek senilai € 29,20 atau sekitar Rp450 ribu.

Syahrul wajar berbangga karena Kopi Blawan menjadi salah satu kopi unggulan yang dijual oleh Berliner Kaffeerösterei, toko kopi terkemuka di Berlin. Toko ini menawarkan puluhan varian kopi dari berbagai penjuru dunia seperti Etopia, Kolombia, Australia, dan juga Indonesia.

“Melihat kopi kita dihargai dengan nilai tinggi tentu menjadi penyemangat untuk terus menggiatkan ekspor

pertanian, termasuk untuk komoditas kopi. Ayo terus tingkatkan produktivitas dan kualitas produk kita sehingga kita bisa merajai pasar dunia,” ungkap Syahrul, dikutip dari keterangan pers, Jumat (17/1/2020).

Di Jawa Barat (Jabar), Mentan Syahrul melepas ekspor sayur dan umbi yang diproduksi PT Alamanda Sejati Utama di Banjarnegara, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/1/2020). Sayur mayur ini diekspor ke sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Tiongkok, Hongkong, dan Korea Selatan.

“Nilai transaksi yang dihasilkan dalam lalu lintas ekspor tersebut mencapai Rp4,17 miliar. Ini merupakan bukti bahwa mengelola pertanian itu tidak ada ruginya. Apalagi Tuhan telah menitipkan alam yang luar biasa bagus kepada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan menambahkan bahwa sektor pertanian di wilayah kerjanya memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk komoditas sayur mayur dan buah-buahan. **(tim humas)**



GENJOT EKSPOR BERAS DENGAN KOSTRALING

PENCANANGAN DAN SOSIALISASI KOMANDO STRATEGI PENGGILINGAN PADI (KOSTRALING)

DEPOK, 13-14 JANUARI



PEMASARAN beras berorientasi ekspor menjadi prioritas program Kementerian Pertanian (Kementan). Pada 2020, Kementan menargetkan ekspor beras sebanyak 500 ribu ton. Dalam rangka mendukung program tersebut, Kementan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman menginisiasi Program Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) yang melibatkan juga usaha-usaha penggilingan.

Dalam menjalankan perannya, Kementan tidak dapat bekerja sendiri, perlu keterlibatan semua pihak baik kementerian/lembaga (K/L) pemerintah maupun non-pemerintah agar dapat bergerak pada aspek hulu hingga hilir, termasuk dengan para pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras yang tentunya dapat berkontribusi positif dalam pembangunan pertanian nasional.

"Modernisasi pertanian dapat terbentuk jika ekosistem pertaniannya tersambung dari awal hingga akhir, sehingga apabila pertanian maju maka aspek-aspek lain juga turut maju," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam Pencanangan dan Sosialisasi Kostraling 2020 di Margo Hotel, Depok, Jawa Barat, Senin (13/1/2020).

Untuk itu, melalui Kostraling ini Mentan mengajak para pelaku usaha penggilingan padi agar dapat bekerjasama dengan poktan/Gapoktan khususnya yang pernah menerima alat Rice Milling Unit (RMU) atau *dryer* agar saling bantu guna dapat menjaga kualitas produknya, termasuk dalam hal pemasarannya.

"Saya berharap seluruh pelaku usaha penggilingan padi dapat bergabung dengan Kostraling, saya berikan kesempatan kepada yang memang siap dan punya integritas untuk membantu dan berfungsi menjadi muara akhir dari ekosistem pertanian," kata Syahrul.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian kualitas beras adalah kadar air, derajat sosoh, kepecahan, rasa, dan sebagainya yang lebih banyak dipengaruhi oleh penanganan pasca panen. Ini termasuk yang dilakukan dengan alat penggiling atau RMU maupun dengan alat pengering atau *dryer* yang biasanya dikelola pengusaha penggilingan yang juga merupakan atau bekerjasama dengan petani/poktan/gapoktan.

"RMU yang baik apabila prosesnya juga baik dan tidak menyisakan broken yang banyak, untuk itu pilihlah saya orang yang mau bertempur dengan saya mulai pada Maret ini," terang Syahrul.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kostraling dalam hal ini sebagai penanggung jawab dan penyangga di bidang pangan. Mengingat agenda tahun ini SYL merencanakan akan mengekspor beras ke berbagai negara. "Tujuan dari Kostraling tidak hanya menyediakan stok beras nasional, tetapi juga yang sudah berorientasi pada ekspor, karena yang meminta beras dari kita juga sudah ada," jelasnya.

Syahrul pun menuturkan bahwa pada Januari mulai memasuki masa panen, sedangkan bulan Februari sudah masuk



30-40 persen dan pada bulan April diprediksi akan menjadi puncak panen di beberapa daerah. "Untuk itu perlu kita rumuskan nantinya siapa yang siap untuk menyerap dan menggiling hasil panen dari petani," tuturnya.

Syahrul menjelaskan, tiga agenda utama yang akan dijalankan Kostraling antara lain *Quick Wins* yaitu, agenda untuk penyerapan padi dan gabah pada Maret; lalu agenda Mempersiapkan Kostraling lebih kuat dengan kebenaran system; dan terakhir Permanen agenda yaitu, mempersiapkan semua wilayah RMU secara jelas. "Intinya adalah penggilingan padi dibutuhkan pertanian, karena tanpa penggilingan padi, maka padi tidak akan menjadi beras," tandasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi menambahkan, industri penggilingan harus siap dan sanggup menyerap gabah petani serta memperbanyak lagi gudang-gudang di penggilingan padi. "Dalam hal ini, Kementan memiliki Program *Quick Wins*, dimana penggilingan bermitra dengan petani dan konsumen. Pasokan harus sustain menjadi hal yang paling utama," jelasnya.

Suwandi menyebutkan, ada kerja sama dengan penggilingan padi untuk ekspor beras 300 ribu ton tahun ini. Kemudian pihaknya akan menindaklanjuti dengan membangun nota kesepahaman. "Pangsa ekspor yang yang potensial di Timur Tengah, PNG, dan negara lain," sebutnya. **(tim humas)**

PERTANIAN, SOLUSI PERMANEN TURUNKAN KEMISKINAN



SEKTOR pertanian merupakan pilihan pasti untuk meningkatkan kesejahteraan. Karenanya, penting mengoptimalkan lahan pertanian sebagai solusi permanen dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Demikian yang ditegaskan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Ketua DPD Bali I Made Mangku Pastika berkaitan dengan Ekspor Beras Organik ke Timor Leste dan Penyerahan Aplikasi Peta Potensi Ekspor Bali, IMACE di Denpasar, Sabtu (4/1/2020).

“Kalau kita bicara Bali, semua orang tahu bahwa sejak dulu Bali itu adalah contohnya pertanian. Zaman jadi lurah, saya dapat ilmu pengelolaan air dari

Bali. Pertanian di Bali itu adalah pilar utama dalam menurunkan angka kemiskinan,” ujar Mentan.

Menurut Syahrul, sektor pertanian adalah salah satu sektor penting yang memiliki kontribusi besar terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Lebih dari itu, sektor pertanian mampu mendorong masyarakat memiliki kehidupan layak dengan skala ekonomi yang terus meningkat.

“Pertanian itu bersolusi langsung pada rakyat. Bicara pertanian berarti kita bicara lapangan pekerjaan. Dari jagung saja bisa 42 jenis, belum lagi dari jenis lain. Makanya, kita harus menjadikan pertanian sebagai tempat kerja yang baik dan tempatnya orang-orang menjadi kaya raya,” katanya.

Di samping itu, Syahrul mengatakan, saat ini sektor pertanian sedang berjalan pada koridor yang jauh lebih modern dengan pemanfaatan sistem teknologi dan mekanisasi. Sistem ini masuk pada bagian-bagian revolusi industri 4.0, dimana seluruh perangkat yang ada sudah menggunakan artificial intelligence.

"Jadi, pertanian itu tidak lagi penuh dengan lumpur, atau berkeringat dan capek. Pertanian sekarang di era 4.0 hanya duduk manis di kali dan bermain dengan *smartphone* atau komputer," katanya.

Di tempat terpisah, Pengamat Pertanian yang juga Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) Entang Sastraatmaja mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menempatkan posisi penyuluh sebagai garda utama kebangkitan pertanian Indonesia. Ini ditandai dengan hadirnya Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang ada di setiap kecamatan.

Kata Entang, langkah tersebut merupakan langkah nyata dalam menguatkan program pemerintah terkait penurunan penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan. "Perang melawan kemiskinan harus dirumuskan secara multisektor. Program dan kegiatannya harus dikemas dalam bentuk gerakan. Yang terpenting harus dicari juga inovasi penggarapannya dengan model kolaborasi para pihak. Di sinilah saya melihat ada semangat baru dari Mentan SYL untuk lebih memartabatkan para penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Menurut Entang, *grand design* Kostratani yang digagas Syahrul melalui revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari semua pihak. Kostratani memberi harapan baru dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani.

"Saya sangat mendukung karena *grand design*-nya sudah dirumuskan secara cerdas. Pendekatannya adalah sebuah gerakan yang komprehensif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani. "Saya berharap, kehadiran Kostratani diiringin dengan hadirnya Kelembagaan bisnis tani atau agripreneur," tandasnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,43 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Penurunan terjadi pada periode September 2019, dimana angka sebelumnya, yakni pada Maret 2018, angkanya masih cukup tinggi.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa faktor penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya rata-rata upah nominal buruh tani pada September 2019. Adapun presentasi kemiskinan pada bulan tersebut mencapai 9,22 persen. "Angka sebesar itu, kalau kita bandingkan dengan pada Maret 2019 berarti terjadi penurunan sebesar 0,19 persen, dimana angkanya mencapai 358,9 ribu orang.

Sedangkan pada September 2019 angkanya mencapai 888,7 ribu orang," katanya, Kamis, (23/1/2020).

Dengan penurunan ini, lanjut Suhariyanto, presentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, atau menurun 9,66 persen dibandingkan pada September 2018. Sebagai data tambahan, jumlah penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan secara signifikan. Ini terlihat pada data BPS untuk Maret 2013, dimana angka saat itu mencapai 14,32 persen.

Sedangkan pada Maret 2018, angkanya turun menjadi 13,20 persen. Kemudian angka tersebut kembali turun di periode yang sama tahun 2019, sebanyak 12,85 persen. Adapun pada September 2019, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun kembali menjadi 12,60 persen atau 14,9 juta jiwa.

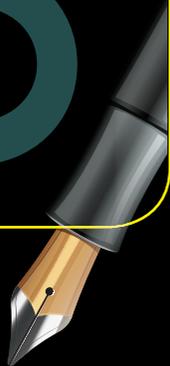
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa ketersediaan pangan yang cukup turut mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 73,8 persen. "Karena itu, tidak berlebihan kalau sektor pertanian selalu mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan nasional supaya mampu menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya," tandasnya.

Kuntoro mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya terlihat jelas dari tidak adanya gejolak harga pangan, sekalipun memasuki hari raya besar dan tahun baru. "Bahkan harga beras sepanjang 2019 cenderung menurun, dan hal ini terlihat pada kelompok pangan beras dan umbi-umbian yang mengalami deflasi sebesar 0,15 persen, dimana beras mempunyai andil sebesar 0,0334 dalam mengendalikan inflasi," ujarnya. **(tim humas)**



KONVERSI LAHAN PERTANIAN, LAWAN!

Oleh : Kuntoro Boga Andri*



BANJIR besar di berbagai kota, termasuk Jakarta di awal 2020 ini, oleh banyak pakar dan pengamat disebut, selain disebabkan karena masalah tata kota dan hidrologi juga karena tingginya konversi lahan hutan dan pertanian di daerah hulu. Areal lahan hutan dan pertanian yang seharusnya menyerap air hujan (*chactman area*), telah dialih fungsi menjadi areal industri, kawasan perumahan, jalan dan fasilitas umum lain. Alhasil, ketika curah hujan yang tinggi kemudian tidak tertampung di sungai dan kawasan terbuka di hilir, menyebabkan banjir. Tak hanya merusak harta benda, banjir kali ini juga menewaskan puluhan jiwa.

Konversi lahan pertanian ke pemanfaatan lain tentu secara nyata membawa dampak buruk terhadap pembangunan dan ketahanan nasional. Pertama, mengancam produksi pangan nasional. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kompetisi pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan juga semakin meningkat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota (RTRWKK) yang tidak memperhatikan kepentingan kawasan penyangga pangan juga membuka peluang menggerus lahan pertanian. Ancaman ini cukup besar, yakni sekitar 3 juta hektare (ha) lahan sawah irigasi dan non irigasi, yang terancam dikonversi ke lahan non pertanian. Sebagai

contoh Jawa Tengah (Jateng), pada tahun lalu saja, telah mengajukan rencana alih fungsi lahan sawah seluas 214 ribu ha untuk lahan non pertanian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 60.000 ha sawah berubah menjadi penggunaan lain di luar pertanian. Angka tersebut setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 300.000 ton setiap tahun. Sesuai penghitungan Luas Sawah Audit Kementerian Pertanian Tahun 2012 luas sawah Indonesia 8.132.344 ha. Sementara Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 399/KEP-23.3/X/2018 menyebut luas sawah hanya 7.105.144 ha. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan sawah sebesar 1.247.481 ha yang diasumsikan sudah beralih fungsi.

Kedua, selain menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, konversi lahan pertanian juga menjadi salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya masyarakat agraris. Dengan semakin sempitnya luas lahan garapan usaha pertanian juga akan menurunkan kesejahteraan petani, atau melahirkan kelangkaan lapangan kerja. Investasi pemerintah berupa bangunan air seperti waduk dan saluran irigasi juga akan terbuang percuma.

Ada beberapa persoalan lain yang harus diwaspadai jika kita bertekad mewujudkan kedaulatan pangan dan keberlanjutan swasembada pangan. Pertama, penambahan jumlah penduduk Indonesia tahun 2035 diperkirakan mencapai 440 juta jiwa, atau tumbuh 1,3 persen-1,5 persen per tahun. Bonus demografi ini harus disikapi secara serius sehingga persediaan pangan dalam secara mandiri dalam jumlah yang cukup menjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, tingkat produktivitas lahan sawah mendekati *levelling off*, sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan, jika tidak diimbangi dengan teknologi intensifikasi dan perluasan sawah 40.000 ha per tahun. Ketiga, kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor semakin ketat dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dasyat.

Langkah Tegas

Alih fungsi ilegal lahan pertanian maupun non pertanian yang berdampak negatif pada produksi pertanian secara ilegal tentu harus ditindak. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf secara terang-terangan telah mendeklasikan untuk memerangi tindakan alih fungsi lahan tersebut. Lihat saja, ketika berkunjung ke Kabupaten Bandung, Sabtu (11/1/2020), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta polisi bergerak cepat menindak pelaku alih fungsi lahan, termasuk kepada aparat yang ikut kongkalikong. Sesuai ketentuan, bila alih fungsi lahan dilakukan secara konspirasi, pelaku bisa dihukum selama tujuh tahun penjara.

Tak hanya itu, pemerintah juga sudah menyiapkan payung hukum untuk melindungi keberadaan lahan sawah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sejumlah peraturan turunannya. Saat ini sekitar 5 juta ha lahan sawah sudah ditetapkan sebagai LP2B dari total 7,1 juta ha lahan baku sawah yang tercatat.

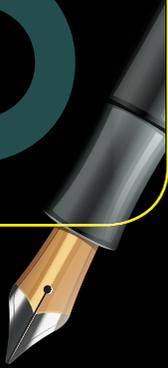
Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian sebagai salah satu bentuk insentif bagi daerah-daerah atau lahan-lahan yang mempertahankan fungsi sawah (LP2B). Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Bantuan ini berupa benih, pestisida, pupuk subsidi, pembangunan jalan, irigasi, dan mesin pertanian.

Berebak Perpres ini juga, dilakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah untuk mendiskusikan dan menyepakati luasan lahan sawah yang akan dilindungi. Hasilnya menjadi bahan Tim Terpadu untuk melakukan sinkronisasi dan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Aturan sudah cukup, yang diperlukan saat ini adalah konsistensi dan komitmen dalam menjalankannya.

Yang perlu diwaspadai adalah, perkembangan penetapan LP2B yang telah disepakati dan dibuat pemerintah daerah, hanya sekitar 50 persen dari semua pemerintah kabupaten/kota. Rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW per Desember 2018 adalah 222 kabupaten/kota dari 476 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda RTRW dan 254 kabupaten/kota tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW.

Luas sawah berdasarkan hasil audit Kementerian Pertanian pada Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dalam Perda RTRW seluas 4,80 juta ha dan LP2B yang ditetapkan pada Kabupaten/Kota tersebut seluas 5,66 juta ha. Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW adalah 254 Kabupaten/Kota. Luas sawah pada Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan LP2B seluas 2,64 juta ha. Total luas sawah pada seluruh Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda RTRW seluas 7,44 juta ha dan total LP2B yang ditetapkan pada Kabupaten/Kota tersebut seluas 5,66 juta ha. Berdasarkan luasan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada jaminan bahwa seluruh sawah akan dilindungi dan ditetapkan menjadi LP2B.

Pemerintah sangat yakin, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi UU Nomor 41/2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup antara lain (a)



Dukungan Peraturan Daerah; (b) Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian; (c) Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan; (d) Struktur penguasaan lahan petani; (e) Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali; (f) Perpecahan (division) dan perpecahan (fragmentation) lahan; (g) Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Selanjutnya, langkah-langkah perlindungan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang sudah dilakukan pemerintah pusat antara lain, pertama, Surat Menteri Pertanian kepada Bupati/Wali Kota tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kab/Kota. Kedua, Surat Menteri Pertanian kepada Bupati tanggal 13 September 2016 tentang Permohonan Tindak Lanjut Hasil Perluasan Areal Sawah Baru dengan mencatatkan ke BPS dan ditetapkan pada sebagai luasan LP2B. Ketiga, Surat Dirjen PSP kepada Bupati tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan LP2B dalam Perda RTRW dilengkapi dengan data spasial 1:5.000.

Pemerintah sangat berharap agar kiranya para pengambil keputusan baik gubernur dan bupati/walikota memahami peran RTRW sebagai landasan hukum dalam pembangunan daerah, perlindungan LP2B. Selanjutnya, ada jalur atau mekanisme yang transparan, konsisten dan berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan. Ini agar pemda mengikutsertakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai anggota BKPRD provinsi dan kab/kota.

Pencegahan alih fungsi lahan pertanian merupakan tanggung jawab semua pihak. Upaya dan komitmen Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menindak tegas pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian harus menjadi gerakan perubahan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan mudah diwujudkan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya lahan pertanian di masa yang akan datang demi keberlangsungan dan keberlanjutan atas ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. (**)

** Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian*



Manggis Cianjur

Tembus Pasar Abu Dhabi, Qatar dan Taiwan

Cianjur mempunyai potensi ekspor manggis cukup besar

Tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya manggis Cianjur sudah menembus pasar **Abu Dhabi, Qatar dan Taiwan**

Catatan BPS menunjukkan produksi 2017 mencapai **161.751 ton**

Pada 2018 produksi manggis naik menjadi **228.148 ton**



pada 2019, Indonesia sudah ekspor manggis sampai **24,7 ribu ton** dengan nilai transaksi **35 juta dolar AS**

Kementan terus mendorong akselerasi dan peningkatan ekspor

Ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk melejitkan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat





AWALI 2020,

MENTAN LAKUKAN SAFARI K/L

UNTUK memuluskan dan menguatkan sinergitas antar kementerian/lembaga (K/L), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan safari ke sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Salah satunya mengunjungi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memantapkan kolaborasi untuk saling bersinergi dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) pada November 2019.

Syahrul mengatakan, pertemuan ini dilakukan dengan pendekatan emosional kepada Mendag dan para jajaran Kemendag untuk menyamakan, menyelaraskan pengambilan kebijakan antar K/L. "Kementan harus satu langkah, satu jalan dan satu bahasa dengan Menteri Perdagangan. Intinya kita mengharapkan support Menteri Perdagangan sepenuhnya," katanya saat diwawancarai di Kantor Kemendag di Gambir, Rabu, (8/1/2020).

Mentan menambahkan, dukungan dari Mendag untuk melipatgandakan perdagangan di bidang pertanian, khususnya ekspor akan diberikan berupa *guides* dan *support*-nya demi menjalankan amanah membangun negara.

"Kita punya komitmen, petani *Insya Allah* berproduksi lebih baik, berkualitas tentu saja kita bicara dengan ekspor dengan dunia tentang komoditas kita yang banyak," tambah Syahrul.

Selain itu, Mentan juga menegaskan jika saat ini *single data* yang diusung Kementan akan menjadi acuan serta

pegangan yang digunakan Kemendag atau kelembagaan lainnya dalam membuat kebijakan yang benar. "Memang betul perbedaan data akan menyesatkan arah kita. data yang *amburadul* darimana perencanaan tidak bias. Karena itu, *single data* kita perbaiki dan itu menjadi pegangan bersama Mendag," tuturnya.

Mendag Agus Suparmanto juga membenarkan bahwa *single data* digunakan Kemendag untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan perdagangan, khususnya sektor strategis seperti pangan. "Kalau mengenai data kita memang sudah satu pintu *lah*, jadi tidak ada perbedaan di sini lah kita sangat senang bersinergi dengan Kementan," tandasnya.

Agus mengungkapkan, Kemendag memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan perdagangan, dimana dukungan dari kementerian lain, khususnya Kementan sangat dibutuhkan sehingga tujuan kedua kelembagaan dapat dijalankan bersama-sama. "Memang dalam menentukan kebijakan ini kita perlu kerja sama, terutama yang berkaitan dengan pangan apalagi kita mau tingkatkan pangan untuk mengekspor, sehingga kita akan lebih selektif," sambungnya.

Selain menemui Mendag, Mentan Syahrul juga mengunjungi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Kantor Pusat Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

"Pertemuan ini selain meningkatkan sinergitas, juga sebagai koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami ingin mencari solusi bersama terkait hadirnya lapangan pekerjaan untuk rakyat serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan,"

ujarnya, Kamis, (9/1/ 2020).

SYL berdiskusi mengenai mekanisme dan rancangan program jangka panjang untuk membangun pertanian di wilayah Merauke. Rancangan tersebut, salah satunya memperkuat kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani). Untuk itu, Mentan SYL meminta dukungan Men PAN-RB tentang optimalisasi kelembagaan para penyuluh.

“Peranan para penyuluh sebagai ujung tombak utama pertanian kita juga harus diperkuat secara masif dan terstruktur di semua level desa,” katanya.

Menurut Syahrul, rancangan ini juga sudah memiliki target ekspor sebesar Rp2.000 triliun dengan menggunakan sistem mekanisasi dan teknologi. Di samping berupaya menjamin tercukupinya kebutuhan makan 267 juta penduduk Indonesia.

Men PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan terima kasih atas kunjungan Mentan Syahrul ke ruang kerjanya sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas. Dia mengaku siap melakukan kolaborasi dengan jajaran Kementan dalam membangun kedaulatan pangan.

Di tempat terpisah, saat menerima kunjungan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) serta jajarannya,

Senin (6/1) di Komplek Kediaman Menteri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Mentan Syahrul mengatakan bahwa kesiapan infrastruktur daerah merupakan salah satu daya dukung dalam pembangunan pertanian nasional.

“Pola pembangunan sistem kluster menuntut kualitas jalan dan pelabuhan yang baik dan memadai. Bahkan daya tampung pelabuhan harus berorientasi ekspor. Ini akan memperpendek rantai dan menstimulus perekonomian daerah berputar,” katanya.

Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan bahwa Sumsel kini tengah berbenah. Pihaknya menargetkan, perbaikan jalan yang dibawah wewenang pemerintah provinsi selesai pada akhir 2020.

“Kami memiliki cita-cita, produk pertanian kami bisa dikenal luas seperti beras, kopi dan yang lain-lain. Karena itu, kami ingin mengirim langsung dari Sumsel melalui pelabuhan-pelabuhan yang kami miliki. Potensi alam dan luasan lahan di Sumsel sangat potensial untuk pengembangan komoditas tanaman pangan dan perkebunan,” katanya. **(tim humas)**



TEROBOSAN MAJUKAN PERTANIAN INDONESIA

FOKUS kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) pada awal 2020 diarahkan terhadap peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian untuk kesejahteraan petani. "Untuk Pertanian Maju, Mandiri, Modern demi kesejahteraan petani, maka dibutuhkan akselerasi yang cepat pada awal Januari untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dengan target realisasi anggaran per triwulan adalah 45 persen, 60 persen, 80 persen dan 100 persen," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan yang dihadiri ratusan peserta dari seluruh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupten se-Indonesia di Margo Hotel, Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (13/1/2020).

Selain itu mantan Gubernur Sulsel dua periode ini juga menyebutkan panen raya akan dimulai dari Maret-April seluas 5 juta hektare (ha), dimana semua agenda sudah harus dipersiapkan. Selain panen, Kementan selanjutnya fokus pada penyerapan gabah sehingga harga gabah petani tidak anjlok atau memberikan keuntungan pada petani.

"Penyerapan gabah tetap jalan, tetapi kita fiks dari panen raya itu akumulasi ada pada Maret, April. Karena itu, agenda kita sudah siap disitu, sehingga hasilnya dinikmati pada saat panen nanti," ujarnya.

Syahrul mengatakan, fokus program Kementan pada 2020 pun yakni, membangun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Plus yang berbasis digital atau Kostratani (Komando Strategis Pertanian). Pasalnya, penyuluh adalah ujung tombang pembangunan pertanian modern sehingga keberhasilan pertanian dilakukan dari lapangan.

"Selain peningkatan produksi, Kementan juga fokus menciptakan pengusaha milenial. Petani harus berperan penuh dari hulu ke hilir yakni mulai tanam, produksi, petik dan pemasaran dilakukan sendiri hingga ke tingkat ekspor," terangnya.

Melalui rakernas ini, Mentan pun menegaskan kementerian yang dipimpinnya berkomitmen membangun sinergitas untuk menuntaskan



persoalan rawan pangan yang berada di 88 kabupaten. Pemenuhan pangan merupakan tugas negara sehingga menjadi keharusan untuk dituntaskan sehingga sektor pertanian semakin nyata berkontribusi membangun kesejahteraan rakyat. "Daerah rawan pangan ada 88 kabupaten, Kementan akan lakukan intervensi langsung untuk menanggulangi permasalahan itu. Kita perkuat apa yang kita miliki," tegasnya.

Syahrul menjabarkan tiga hal yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian Indonesia. Pertama, harus mengetahui kebutuhan dan harapan petani di masing-masing daerah. Kedua, biasakan petani memecahkan masalahnya secara mandiri, sehingga pemerintah hanya membantu mensupport dan mengasistensi. Ketiga, Intervensi teknologi dan modernisasi sebagai pemecah masalah.

"Ubah paradigma kalian dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Dorong semua pihak mulai dari petani sampai pihak swasta dan BUMN menyelesaikan masalah secara bersama. Ini agar gerakan kita semakin besar dan mandiri," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Ditjen Tanaman Pangan pun melakukan penancangan dan sosialisasi Kostraling. Dirjen Tanaman Pangan Suwandi menekankan agar industri penggilingan harus siap dan sanggup menyerap gabah petani serta memperbanyak lagi gudang-gudang di penggilingan padi. "Kementan memiliki Program Quick Wins, dimana penggilingan bermitra dengan petani dan konsumen. Pasokan harus sustain menjadi hal yang paling utama," jelasnya.



"Untuk Pertanian Maju, Mandiri, Modern demi kesejahteraan petani, maka dibutuhkan akselerasi yang cepat pada awal Januari untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dengan target realisasi anggaran per triwulan adalah 45 persen, 60 persen, 80 persen dan 100 persen."

Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian





Sementara di Denpasar, Mentan Syahrul menyampaikan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat. “Kita berkomitmen untuk mengkonsumsi makanan sehat, agar pikiran sehat, tubuh sehat, dan Indonesia sehat. Tapi ingat, kita juga harus makan yang sesuai dengan budaya kita. Yang suka makan sagu makan sagu lebih banyak, yang suka makan jagung makanlah jagung lebih banyak,” ujarnya saat menggelar lari pagi *Car free Day* di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Minggu (5/1/2020).

Syahrul berharap Bali menjadi pionir menggerakkan pola hidup sehat dari hasil pertanian. Bali harus menjadi lokomotif dan saksi sejarah dalam mengawal perjalanan pertanian modern dan ekspor. “Besok pertanian kita harus lebih maju, harus lebih mandiri dan harus modern. Kita hadir di Bali ini tidak lain untuk kepentingan kehidupan kita hari ini dan esok. Kita hadir untuk mengatakan negara kita adalah negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain,” tandasnya.

Di lain pihak, Komisi IV DPR mengapresiasi upaya koordinasi Kementan untuk membenahi distribusi pupuk subsidi yang terhambat di beberapa daerah. “Masalah distribusi pupuk subsidi memang tidak bisa jalan sendirian (Kementan, red). Memerlukan koordinasi dengan instansi dan pengambil kebijakan lainnya,” ujar Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah, Jumat (10/1/2020).

Sebelumnya, Kementan telah menerbitkan Peraturan Mentan (Permentan) Nomor 01/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Dalam Permentan tersebut, dijelaskan bahwa produsen

pupuk harus cepat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di daerah untuk mengalokasikan pupuk subsidi sesuai kebutuhan. Begitu pula dengan Dinas Pertanian di daerah supaya tidak memperlambat terbitnya SK ke produsen agar penyaluran pupuk subsidi cepat dilaksanakan.

Kembali menyikapi distribusi pupuk subsidi, Luluk mengungkapkan, kebijakan Kementan dalam regulasi itu dapat juga dinilai sebagai cara menyederhanakan birokrasi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, potensi perbenihan yang dimiliki Nusa Tenggara Barat (NTB) sangatlah besar. Berbagai jenis benih pangan dapat diproduksi provinsi tersebut. “Karena itu, Komisi IV DPR RI menginginkan NTB agar menjadi lumbung benih nasional,” ujarnya saat Temu Wicara dengan Produsen Penangkar di Pulau Lombok, NTB, Jumat (17/1/2020).

Daniel menjelaskan, tugas negara tidak hanya pada menjadikan pangan harus mandiri dan berdaulat, namun demikian benihnya juga harus mandiri. Daerah lain bisa belajar dari NTB yang mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan menurunkan angka kemiskinan karena geliat pertanian. “Maka dari itu, NTB harus naik kelas lagi yakni, di bidang perbenihan,” bebernya.

Dirjen Tanaman Pangan Suwandi mengatakan, agar bisa memasok benih ke daerah lain, maka NTB harus memantapkan sistem perbenihan padi dan kedelai. Selanjutnya bangkitkan industri jagung, sehingga minimal memasok kebutuhan di wilayahnya. “Kita



bersama-sama menarik investor untuk bermitra dengan penangkar. Setidaknya sudah ada dua investor yang komitmen membangun industri benih jagung di NTB. Juga ada satu investor untuk membangun industri benih komoditas lainnya,” terangnya.

Pengamat Pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan (Kalsel) Luthfi Fatah mengapresiasi sasaran Mentan Syahrul untuk menambah minat generasi muda menekuni sektor tani, sehingga melahirkan banyak agroentrepreneur. Keinginan tersebut akan mengubah paradigma profesi petani di Indonesia.

“Selama ini kesannya petani adalah kelompok yang pendidikannya rendah dan tidak modern. Nah, padahal itu anggapan salah. Kalau Syahrul Yasin Limpo mau mengubah persepsi itu harus diapresiasi,” ujarnya, Senin (20/1/2020).

Dengan target menambah jumlah generasi milenial bekerja di bidang tani, lanjut Luthfi, maka pertanian Indonesia akan sejajar dengan negara maju lainnya soal modernisasi. “Generasi milenial itu generasi teknologi modern. Pertanian kita akan dikelola modern nantinya. Ditambah lagi tingkat pendidikan yang maju dari generasi milenial, sehingga petani bukan golongan terbelakang lagi,” tandasnya.

AWR Siap Beroperasi

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ketut Kariyasa memastikan perkembangan Agriculture War Room (AWR) pada pertengahan Januari 2020 sudah mencapai 75 persen. Dengan begitu, seluruh konten

maupun koneksi yang terhubung dengan berbagai daerah diseluruh Indonesia sudah memasuki tahap final atau masa operasi.

“Persiapan konten AWR sudah mendekati 80 persen atau paling tidak ada lima yang bisa kita lihat secara umum. Ini di antaranya soal kondisi pertanaman dan layanan program hingga di tingkat Kecamatan,” ujarnya saat mendampingi Mentan di Ruang AWR Gedung A, Rabu, (15/1/2020).

Kariyasa menjelaskan, saat ini sistem AWR juga sudah bisa memantau indikator-indikator pembangunan pertanian dan perkembangan inflasi bahan pangan serta memantau Produk Domestik Bruto pertanian secara nasional. “Jadi dari sistem ini kita bisa melihat provinsi mana yang PDB-nya paling besar dan kecil. Di samping itu kita juga bisa membantu progres realisasi pupuk di masing-masing kecamatan,” katanya. **(tim humas)**



JANGAN KHAWATIR, PETANI DILINDUNGI

ASURANSI



Ancaman Bencana Alam, Syaratnya Ikut AUTP

MUSIM hujan yang datang pada akhir 2019 sampai puncaknya pada Februari 2020 merupakan ancaman terhadap lahan pertanian Indonesia. Meski demikian, petani tak perlu khawatir akibat kerusakan tanaman akibat bencana alam. Nah untuk melindungi petani, pemerintah

menganjurkan petani ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, perubahan iklim yang kian sulit ditebak menjadi tantangan dalam usaha tani. Apalagi usaha tani merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya.



“Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai,” katanya, Selasa (14/1/2020).

Dikatakannya, penggunaan benih yang sesuai atau spesifik lokasi, pemberian pupuk seimbang dan tepat waktu, penggunaan pestisida secara bijak, serta manajemen pengairan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan.

“Ketika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, kegiatan usaha tani dapat berjalan lancar, sehingga mampu menghasilkan produksi yang yang diinginkan. Tetapi terkadang, sering terjadi gagal panen karena fenomena iklim, sehingga melunturkan semangat petani,” ungkap Sarwo Edhy.

Agar semangat petani tidak padam,

pemerintah dalam hal ini Kementan membuat program perlindungan kepada petani yakni asuransi pertanian. Bahkan guna memberikan kemudahan petani, pemerintah memberikan subsidi preminya hampir 80 persen. “Asuransi pertanian merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang telah ditetapkan. Jadi asuransi pertanian ini pada dasarnya membantu petani apabila terjadi kegagalan,” paparnya.

Dengan asuransi pertanian, petani yang gagal panen bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim. Sebab, petani yang mengikuti asuransi pertanian akan mendapatkan penggantian Rp 6 juta per hektare (ha). “Tentu ini akan mengembalikan semangat petani untuk kembali memulai usaha taninya,” tambah Sarwo Edhy.

Asuransi pertanian atau lebih dikenal

juga AUTP yang dikembangkan Kementan sampai saat ini tak menemui banyak kendala. Pembayaran klaim yang dilakukan PT Jasindo pun berjalan lancar.

Untuk mempermudah pendaftaran dan pendataan asuransi, Kementan bersama PT Jasindo juga menerbitkan layanan berbasis online melalui Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Sepanjang 2019, PT Jasindo sudah membayar klaim AUTP ke petani sebesar Rp104 miliar.

Kepala Divisi Asuransi Agri dan Mikro PT Jasindo, Ika Dwinita Sofa mengatakan, musim kemarau panjang 2019 tak bisa dihindarkan lagi. Dari total klaim AUTP yang dibayarkan ke petani, sebesar Rp50 miliar dikarenakan sawahnya terkena kekeringan.

Ika mengakui, nilai klaim AUTP yang dibayarkan ke petani pada 2019 cukup besar. Selain klaim bencana kekeringan, PT Jasindo juga harus membayar klaim yang disebabkan bencana banjir sebesar Rp22 miliar.

Bantuan Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) menyerahkan bantuan kemanusiaan ke lima titik banjir di wilayah Jakarta dan Tangerang. Bantuan pangan tersebut

berjumlah 10 truk dan langsung diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kepada masyarakat korban bencana banjir.

Syahrul mengungkapkan jika bantuan yang dibagikan tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dimana pemerintah harus bisa menopang masyarakat, terutama yang sedang mengalami bencana. Dengan demikian, di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, betul-betul membangun sinergitas antar lembaga dan pihak lainnya untuk cepat tanggap membantu masyarakat yang terdampak musibah.

"Saya sebagai Menteri Pertanian menindaklanjuti perintah presiden agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat dalam suasana seperti banjir atau bencana seperti saat ini, sehingga masyarakat mengetahui jika negara siap membantu mereka," ungkap SYL dalam acara Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Banjir DKI Jakarta dan Sekitarnya di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (4/1/20).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mengatakan, sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mendapatkan titik titik yang akan mendapat bantuan. Titik yang mendapat bantuan antara lain, Jakarta Utara, Jakarta Selatan,



Jakarta Timur, Jakarta Barat serta Tangerang Selatan.

Bantuan yang diberikan Kementan secara simbolis di serahkan Mentan kepada korban bencana banjir pada acara tersebut antara lain kepada kelurahan Sukapura, Semper Barat, Semper Barat, Cilincing dan dolokan. Bantuan yang akan diberikan, yakni empat truk untuk Jakarta Utara, tiga truk untuk Tangerang Selatan, satu truk Jakarta Timur, satu truk Jakarta Selatan, satu truk Jakarta Barat berisikan. Bantuan berisikan sembako, selimut, sarung, pampers, handuk, biskuit, air mineral, mie instan dan 1 truck dari Pertani (mitra kerja) berupa beras sejumlah 2,5 ton.

Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (7/1/2020), Mentan meninjau lokasi banjir dan longsor terparah. Syahrul memantau deretan sawah yang terdampak banjir dan rumah warga yang hancur tersapu derasnya air bah kali Nunggul di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas.

"Saya ingin lokasi ini diperbaiki dan kembali difungsikan sebagai lahan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar," ujar Syahrul yang didampingi Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya serta jajaran perangkat desa dan para petani setempat.

Syahrul mengatakan, Lebak merupakan salah satu wilayah penyangga pangan dan kawasan pertanian nasional yang harus dipulihkan dengan kekuatan gerakan kedaulatan pangan. Lebak adalah kabupaten subur yang berpotensi mendorong Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

"Karena itu pertanian adalah bagian dari gerakan yang harus kita bangun bersama. Sektor pertanian harus menjadi konsep pendidikan dan edukasi yang baik untuk menghidupkan perekonomian masyarakat luas," katanya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pemberian bantuan jajarannya Kementan kepada warga terdampak banjir dan longsor di Lebak. **(tim humas)**



SAPA MENTAN KEPADA PENYULUH PETANI

SE-INDONESIA



Menuju Penas 2020 di Sumbar

MENGAWALI 2020 dan hari pertama bekerja, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek beberapa ruangan kerja lingkup Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu berkesempatan menyapa melalui teleconference dengan beberapa penyuluh di seluruh Indonesia yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Teleconference tersebut dilakukan di Agriculture Operational Room (AOR) Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Agricultura War Room (AWR).

"Di awal 2020 ini, kalian (penyuluh, red) bisa langsung bertemu dengan saya di menit yang sama (melalui teleconference, red). Era (teknologi, red) sekarang merubah cara hidup orang yang selama ini sudah menjadi budaya. Berubah dengan tantangan-tantangan baru kehidupan. Salah satunya yang kita lakukan sekarang ini (teleconference)," tutur Mentan saat teleconference, Kamis (2/1/2020).

Syahrul mengatakan, tak hanya teknologi teleconference, Internet of Things, Artificial Intelligence (AI), hingga Robot Construction di masa sekarang hingga masa depan akan mampu mengubah kehidupan manusia bahkan menimbulkan tantangan-tantangan baru yang harus bisa dihadapi dan diadaptasi oleh masyarakat, tak terkecuali penyuluh pertanian.

Sebab, ungkap Syahrul, penyuluh pertanian adalah inti dari agent of change pembangunan pertanian. Karena itu, jadilah penyuluh pertanian yang hebat. Penyuluh harus mampu mengelola pertanian yang ada di masyarakat.

Karenanya, SYL meminta kepada penyuluh



pertanian di seluruh Indonesia untuk membantu dirinya membangun pertanian. Kementan mendorong petani bertani secara mandiri, modern dan maju melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam kesempatan teleconference dengan Mentan, perwakilan dari BPP Belanakan, Kab Subang, Jawa Barat (Jabar) menyampaikan bahwa terdapat 5.300 hektare (ha) lahan di wilayahnya dan saat ini sedang melakukan persiapan untuk musim tanam dan juga semai. "Kami siap untuk musim tanam sekarang, bibit sudah ada, sebelumnya kita ada masalah air tapi karena awal tahun sudah turun hujan jadi pengolahan lahan dapat mulai dilaksanakan," ujarnya.

Di tempat terpisah, sejumlah petani di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar menyambut baik adanya Program KUR yang dikelola pemerintah dan dikawal melalui Kementan. Mereka menilai, program tersebut sangat membantu masa depan usaha dan bertani petani, terutama pada penguatan ekspor.

"Terus terang kami bahagia karena Menteri Pertanian memaparkan Program KUR, tentu program ini yang

menjadi harapan kami selama ini," ujar salah satu petani di Pangalengan, Ajat (35), Sabtu (11/1/2020) dalam pertemuan singkat Mentan SYL bersama petani lainnya di Nudira Farm Pangalengan, Jabar.

Ajat mengaku memiliki harapan besar di benak Mentan Syahrul terkait kesejahteraan dan kemakmuran petani Indonesia. Kementan dibawah pimpinan SYL diharapkan mampu mengangkat martabat petani ke tempat yang lebih baik.

"Kami punya harapan dan mimpi bahwa kami disejahterakan pemerintah melalui berbagai kebijakan, terutama soal pengaturan harga. Semoga di kepemimpinan bapak, nasib kami lebih baik," tandasnya.

Harapan yang sama juga dikatakan seorang penyuluh Endang Supriatna. Menurut dia, Program KUR merupakan program yang diharapkan rakyat sebagai akses utama dan fasilitas pengembangan usaha tani. Namun, di satu sisi, dia berharap pemerintah mempercepat pengangkatan penyuluh sebagai PNS.

Sementara di Bali, Mentan Syahrul menghadiri



pertemuan dan tatap muka dengan para penyuluh dan petani di Kabupaten Karangasem. Pertemuan ini digelar dalam rangka mewujudkan pertanian modern, maju dan mandiri.

“Kehadiran kami adalah untuk memastikan bahwa Karangasem harus lebih baik dari hari ini. Saya yakin alam yang Tuhan berikan kepada Bali adalah alam yang khusus pilihan Dewa agar kita hidup lebih baik lagi,” ujarnya, Minggu (5/1/2020).

Menurut SYL, sektor pertanian menjadi pilihan penting karena mampu memberikan kehidupan layak dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Sektor ini merupakan sektor utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Matangkan Ajang Pertanian

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) selaku tuan rumah dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tengah menyiapkan pelaksanaan Pekan Tani Nelayan (Penas) 2020. Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Penas 2020 harus menjadi ajang pertanian maju, mandiri, modern.

“Karena itu mindset kita semua harus sama. Penas 2020 Sumbar harus sukses. Tidak ada *trial and error*, tapi yang ada *trail and success*,” tegas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi



kepada seluruh jajaran pemerintah kota (pemkot), kabupaten (pemkab), provinsi (pemprov) dan Kementan yang menghadiri Rapat Koordinasi Penas 2020 di Aula kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Rabu (22/1/2020).

Dedi menuturkan, kebersamaan, fokus dan terukur itu kunci keberhasilan Penas. Sebab waktu tidak terasa berjalan, yakni hanya mempunyai empat sampai lima bulan saja, sehingga setiap tahapan harus terukur harus diperhatikan. "Dan tetap semangat untuk bersama menyukseskan Penas segala kendala bisa kita atasi dengan kebersamaan dengan komunikasi," ujarnya. Penas 2020 rencananya digelar pada akhir Juni mendatang.

Ketua Umum KTNA Nasional Winarno Tohir, sekaligus Ketua Panitia Penas 2020 mengatakan, yang berbeda pada ajang Penas 2020 adalah pelaksanaan di dua tempat yaitu, di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Karena itu dalam rapat koordinasi ini sangat penting menjalin kebersamaan semua stakeholder dan menentukan tahapan yang terukur untuk memastikan kesuksesan Penas 2020.

"Penas 2020 akan menghadirkan gelar teknologi baik pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan. Penas akan menjadi ajang sharing informasi antar petani dan nelayan dari berbagai lokasi di Indonesia," jelasnya. **(tim humas)**



PASOKAN JAGUNG UNTUK PAKAN TERNAK

AMAN

BERBAGAI langkah koordinasi telah dilakukan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung, khususnya untuk industri pakan dan peternak.

Menurut Direktur Pakan Ternak Ditjen PKH Sri Widayati, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara daring atau online menggunakan aplikasi Simpakan. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal 2020 ini harganya stabil.

“Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Dan stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” tambah Widayati.

Selama satu tahun, lanjut dia, biasanya ada tiga kali panen raya jagung yakni, pada Februari-April, Juli-Agustus dan panen ketiga pada November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang pada 2020 diperkirakan mencapai 24.16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang 2020.

Di tempat terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendukung sepenuhnya Program Provinsi Bali mencapai Satu Juta Ternak Sapi Bali. Ini disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman antara Kementan dengan Gubernur Bali di Denpasar, Sabtu (4/1/2020). Salah satu nota kesepahaman tersebut adalah terkait Populasi Sejuta Sapi Bali Mendukung Program Sapi

Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

Menurut Mentan, Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka Kementan akan mendukung sepenuhnya program-program pertanian dan peternakan di Bali.

SYL juga menyampaikan harapannya bahwa dengan meningkatnya produksi dan produktivitas maka ke depan produksi pertanian tersebut bisa diekspor. Langkah ini selanjutnya sejalan dengan Gerakan Tiga Kali Ekspor atau Grati eks.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Bali merupakan provinsi yang berbasis pertanian, dan penyediaan pangan merupakan salah satu program utama saat ini. Dukungan Kementan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Bali dipandang sangat penting dalam membantu program Pemda dan masyarakat Bali. “Bali kaya akan komoditas pertanian lokal seperti jeruk, salak, kopi, sapi, kambing dan lain-lain. Namun komoditas-komoditas ini belum diberdayakan secara optimal. Ke depan, diharapkan bantuan Kementan untuk mengoptimalkan potensi ini,” jelasnya.

Khusus terkait Program satu juta ternak Sapi Bali pada 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa target tersebut dapat dicapai apabila ada peningkatan jumlah induk sapi sebesar 30 persen-45 persen dari populasi saat ini, dan didukung oleh peningkatan kelahiran pedet sebesar 80 persen-85 persen dari Indukan jumlah sapi. Sementara itu angka pemotongan sapi betina produktif di Bali harus bisa diturunkan hingga 5 persen-10 persen dari pemotongan tercatat saat ini, dan angka kematian pedet harus diturunkan ke angka di bawah 5 persen dari sapi yang lahir.

“Apabila parameter-parameter tersebut tercapai, maka program sejuta ternak Sapi Bali akan kita capai. Ditjen PKH selalu siap mendukung program ini, karena hal ini sejalan dengan Sikomandan, salah satu program penting dari bapak Mentan SYL,” pungkasnya. **(tim humas)**



MENAPAKI 2020 DENGAN PENGHARGAAN

DI AWAL 2020, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menoreh prestasi. Kali ini, Kementan menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas partisipasi pada program ketahanan pangan pada Direktorat Jenderal Pemasaryakatan (Ditjen PAS), sehingga kinerja 2019 dapat tercapai. Program ini dijalankan melalui penanaman komoditas tanaman pangan yang lakukan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan area lembaga permasyarakatan (LP).

Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasaryakatan 2020. "Kementan siap selalu dalam memfasilitasi program ketahanan pangan area LP ini," katanya di Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) Kelas II A Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2020).

Program ini dijalankan Kementan dalam mendorong masyarakat dalam memberdayakan lahan pekarangan

agar mampu menyediakan bahan pangan rumah tangganya sendiri, salah satunya area pekarangan LP. "Kami berharap ke depannya lembaga permasyarakatan kita semakin produktif lagi dan mampu dan mampu memproduksi sendiri kebutuhan di sektor pertanian," tuturnya.

Menkum & HAM Yasonna Laoly menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berperan aktif serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Pemasaryakatan. Ia berharap dukungan terus diberikan dari semua pihak sehingga target Resolusi Pemasaryakatan 2020 bisa tercapai. "Saya mengharapkan dukungan kepada semua pihak untuk mensukseskan pekerjaan besar ini," katanya.

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah K/L di antaranya Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI, KPK, Kementerian PU-PR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian



Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian PP-PA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional RI, Polri, Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung.

Sementara itu, dalam mengemban amanat sebagai garda depan pelayanan publik di Kementan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) terus berupaya memperbaiki dan mewujudkan komitmennya untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini dilakukan untuk menjaga integritas institusi dan memberikan tingkat kepercayaan yang semakin baik kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan.

Komitmen ini ditunjukkan dengan berhasilnya Pusat PVTTP mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dari PT TUV Nord Indonesia. Sertifikat SMAP ini diserahkan langsung Direktur PT TUV Nord Indonesia Bayu Wicaksana kepada Kepala Pusat PVTTP Prof Erizal Jamal pada Rabu (15/1/2020).

Erizal menegaskan, sertifikat tersebut merupakan upaya awal memperbaiki manajemen Pusat PVTTP agar mampu mencegah dan mengendalikan potensi-potensi tindakan yang kurang baik. "Untuk itu, kami mengharapkan seluruh pihak dapat turut serta menerapkan SMAP dalam melaksanakan tugas sehari-hari," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Erizal juga menyampaikan apresiasi kepada Batata Sistem Caraka (BSC) Consulting sebagai konsultan pendamping, PT TUV Nord Indonesia sebagai badan

sertifikasi, dan seluruh komponen Pusat PVTTP yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ini.

Direktur BSC Consulting Wahyudin Lihawa mendorong Pusat PVTTP untuk menerapkan SMAP secara konsisten dan berharap kelak dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya. Tujuan implementasi SNI ISO 37001:2016 adalah untuk peningkatan kinerja. "Dengan demikian, sistem yang dibangun hendaknya adalah yang sesuai dan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan di kantor Pusat PVTTP," katanya. **(tim humas)**



Kementan siap selalu dalam memfasilitasi program ketahanan pangan area LP ini."

Kuntoro Boga

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen 7001:2016



Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen 7001:2016



MUSIM HUJAN, PILIH PADI TAHAN RENDAMAN

MEMASUKI 2020 curah hujan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas ada tinggi dan ada juga yang sedang. Di beberapa wilayah diuntungkan dengan turunnya hujan karena letak geografisnya di dataran tinggi sehingga lahannya dapat digunakan secara intensif untuk bercocok tanam sesuai komoditasnya.

Di dataran rendah dengan curah hujan yang tinggi, lahan akan kelebihan cadangan air sehingga menyebabkan tergenangnya tanaman yang ada di lahan tersebut. Hal itu dapat berpengaruh pada perkembangan tanaman seperti padi.

Untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan terendamnya tanaman khususnya padi di lahan sawah dataran rendah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) telah menghasilkan varietas padi yang tahan terhadap rendaman akibat kelebihan cadangan air atau banjir. Varietas tersebut adalah Inpari 30 Ciherang Sub 1 yang dilepas pada 2012.

Priatna Sasmita, kepala BB Padi mengatakan, varietas padi tersebut memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap rendaman air berlebih. "Inpari 30 Ciherang Sub 1 adalah varietas padi varietas unggul baru yang tahan terhadap rendaman air," ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) Haris Syahbuddin menyampaikan bahwa varietas Inpari 30 Ciherang Sub 1 merupakan varietas yang sudah disiapkan untuk mengatasi rendaman air akibat banjir. Varietas Inpari 30 Ciherang Sub 1 mampu me-recover dirinya saat terendam, hal ini yang menjadi kelebihanannya dan tidak dimiliki oleh varietas padi lainnya.

"Varietas Inpari 30 Ciherang Sub 1 tahan terhadap rendaman air sampai 15 hari. Kalau banjir dan terendam tanaman padi ini mampu menyimpan cadangan energi selama

terendam kemudian tumbuh kembali setelah air surut dan tidak mati, kalau padi yang lain pasti akan mati itu," ucap Haris.

Sesuai deskripsinya Inpari 30 Ciherang Sub 1 cocok untuk ditanam di sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 400 m dpl pada daerah luapan sungai. Dapat juga ditanam di cekungan dan rawan banjir lainnya dengan rendaman keseluruhan fase vegetatif selama 15 hari.

Umur tanaman Inpari 30 Ciherang Sub 1 hanya 111 hari setelah semai dengan potensi hasil 9,6 ton/ha. Tekstur nasi pulen yang disukai sebagian besar masyarakat umumnya. **(uje/tim humas)**





KENTANG SANGKURIANG AGRIHORTI ANTI-PENYAKIT BUSUK DAUN

KENTANG atau nama latinya *Solanum tuberosum* L. merupakan salah satu tanaman pangan terpenting ketiga yang ada di dunia setelah beras dan gandum untuk dikonsumsi manusia. Kentang berasal dari daerah dataran tinggi Andes, Amerika Selatan.

Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu.

Varietas Sangkuriang Agrihorti adalah persilangan dari kentang varietas Atlantik dengan Katahdin, sehingga rasanya masih sama dengan Atlantik. Keunggulan bentuk imbi oval panjang, umur panen 100 – 110 hari setelah tanam, dapat beradaptasi pada dataran tinggi, hasil umbi 24,61-34,99 ton/ha, memiliki daya simpan 2-3 bulan setelah panen.

Varietas Unggul Baru (VUB) Sangkuriang Agrihorti terbukti sangat toleran terhadap penyakit busuk daun. Petani menilai bahwa kentang varietas sangkuriang agrihorti memiliki pertumbuhan tanamannya sangat baik serta produksi umbinya bagus, baik dari kualitas maupun kuantitasnya.

Penggunaan VUB kentang Sangkuriang Agrihorti toleran penyakit busuk daun mempunyai keuntungan relatif yang tinggi, sangat sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan petani.

Dari nilai faktor tersebut maka secara keseluruhan VUB kentang Sangkuriang Agrihorti tersebut mempunyai sifat inovasi teknologi yang sangat tinggi, sehingga berpeluang sangat tinggi untuk diadopsi oleh petani. Dari sisi keamanan pangan, varietas tersebut aman untuk dikonsumsi. **(aiw/tds/
tim humas)**



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NTP

Nilai Tukar Petani

&

(Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian)

NTUP

2020

Naik Signifikan



Berdasarkan data BPS NTP nasional pada bulan Januari 2020 naik sebesar **104,16** atau **0,78 persen**.

Kenaikan terjadi karena rata-rata nilai subsektor tanaman pangan naik sebesar **0,13 persen**

Disusul subsektor hortikultura sebesar **2,05 persen** dan tanaman perkebunan rakyat sebesar **2,45 persen**.

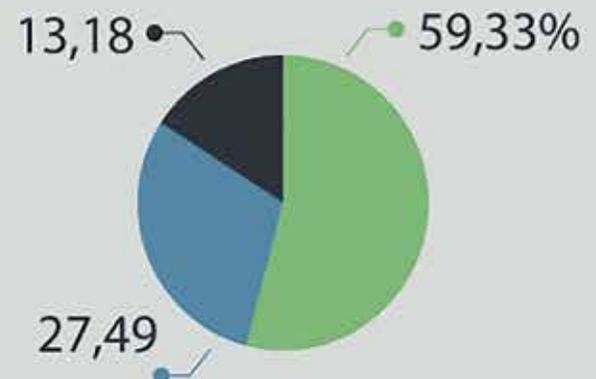
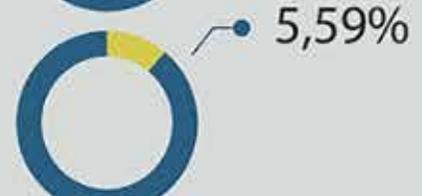
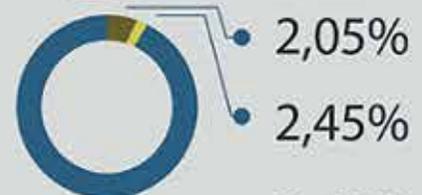
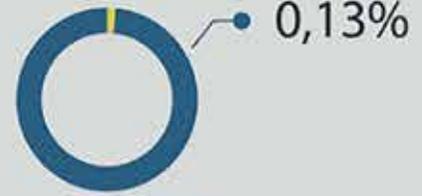
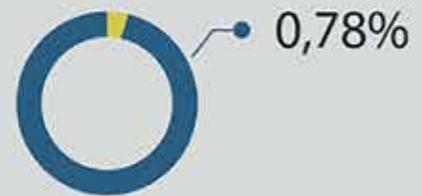
Kenaikan ini tidak terlepas dari indeks harga yang diterima petani (It) sebesar **1,53 persen**

Provinsi Riau merupakan provinsi tertinggi yang berkontribusi pada kenaikan NTP bulan Januari mencapai **5,59 persen**

NTUP Bulan Januari 2020 mencapai **104,72** atau naik **1,10 persen** jika dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Sedangkan untuk Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia mencapai **0,88 persen**

Penjualan gabah di 27 provinsi juga tercatat naik, dengan nilai **59,33 persen** untuk gabah kering panen (GKP), **27,49 persen** untuk gabah kering giling (GKG) dan **13,18 persen** untuk gabah luar kualitas.





Kementan Antisipasi Virus Corona

Kementan ikut menerapkan kegiatan pencegahan dalam mengantisipasi penyebaran virus korona, terutama dalam hal aktivitas impor produk pertanian.



Kementan melakukan penjagaan di pintu masuk kedatangan impor produk pertanian terutama dari negara endemik virus yakni Tiongkok.



Meski bukan sarana penyebaran virus, Kementan akan melakukan pengetatan pintu masuk dan produk pertanian yang masuk ke Indonesia akan diperiksa secara lebih detail.



Upaya pengetatan dilakukan melalui penerapan biosecurity terhadap komoditas impor untuk mencegah penyebaran Virus Corona.



Kementerian Pertanian akan terus melakukan koordinasi terkait pencegahan virus corona bersama dengan Kementerian teknis terkait.

“Security terus kita lakukan oleh karena itu, kekhawatiran yang berlebihan juga tidak perlu dilakukan.”

Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian